

## PENGARUH LINGKUNGAN GLOBAL TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM NILAI BANGSA

**Purnomo Yusgiantoro**  
**Wakil Gubernur Lemhannas**

### PENGANTAR

Perkembangan lingkungan global tidak mungkin lagi dapat diabaikan pengaruhnya terhadap tata kehidupan Nasional. Arus globalisasi yang demikian deras mau tidak mau harus disambut dengan sikap kearifan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang kerdil dan tertutup, tetapi disisi lain tidak melupakan jatidiri atau kepribadian bangsa. Demikian juga pembahasan mengenai pembangunan nasional dan sistem nilai bangsa tidak mungkin dilakukan tanpa memperhatikan perkembangan yang terjadi pada skala global.

**P**engaruh lingkungan global mempunyai daya penetrasi yang kuat, menyebar secara melembaga ke seluruh penjuru dunia (mondial) dengan membawa sistem nilai baru. Penetrasi yang kuat itu didorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Kemajuan teknologi tidak saja memberikan dorongan bagi proses globalisasi, tetapi juga sangat membantu mengatasi kelangkaan (scarcity) yang dihadapi dunia sebagai akibat

permintaan (demand) dunia yang melambung dengan cepat karena ledakan pertumbuhan penduduk. Perkembangan teknologi global yang demikian pesat itu telah menjadikan dunia semakin kecil (global village). Sebagai akibatnya, interaksi dan ketergantungan antar negara menjadi semakin meningkat.

Alvin Toffier (*The Third Wave*, William Morrow & Co New York 1980), dan John Naisbitt & Patricia Aburdene (*Megatrends 2000*, 1990) menangkap pesan penting dari perkembangan global bahwa

telah terjadi pergeseran sistem nilai dari masyarakat tradisional dengan basis pertanian menjadi masyarakat modern yang memiliki kadar teknologi tinggi. Toffier dan Naisbitt banyak mengamati perkembangan yang terjadi di negara-negara tetapi kurang memperhatikan bahwa gelombang-gelombang perubahan tersebut mempunyai derap yang berbeda dengan yang terjadi di negara berkembang. Setiap negara mempunyai tingkat kemajuan masyarakat serta tahapan pembangunan nasional yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, pengalaman pembangunan nasional negara maju tidak dapat begitu saja diterapkan di negara berkembang. Disamping itu, pengaruh global yang membawa sistem nilai baru dapat menimbulkan benturan-benturan terhadap sistem nilai yang sudah ada di suatu negara. Untuk itu, tulisan singkat ini akan membahas perkembangan lingkungan global, pengaruhnya terhadap



**Presiden Abdurrahman Wahid & Tim Ekonomi**  
Pengaruh lingkungan global mempunyai daya penetrasi yang kuat.

pembangunan nasional dan sistem nilai bangsa, serta rumusan arah kebijaksanaan dan langkah-langkah kedepan yang diperlukan.

#### **PERKEMBANGAN GLOBAL**

Ada paling sedikit empat perkembangan penting dalam proses globalisasi yang terjadi sejak Perang Dunia II, yaitu:

**Pertama**, terjadinya perubahan kerjasama multilateral yang dahulu sifatnya sebagai forum konsultasi (non-binding), sekarang sudah berkembang menjadi suatu kerjasama yang sifatnya kohesif atau mengikat (binding) diantara negara-negara anggotanya. Dengan adanya kerjasama yang mengikat ini dalam banyak hal menyulitkan posisi negara berkembang, karena negara-negara maju biasanya sudah lebih dahulu siap dan mempunyai kekuatan menawar (bargaining power) yang lebih baik.

**Kedua**, terjadinya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang tadinya menggunakan pende-

katan konvensional menjadi pendekatan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sekitarnya untuk kepentingan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mulai populer pada waktu konferensi dunia mengenai lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972 menerima gagasan Komisi Brundland. Intinya perlu dilakukan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan dampak negatif lingkungan hidup, terutama di negara-negara berkembang.

**Ketiga**, terjadinya perubahan ekonomi politik dunia, yang dulunya menganut sistem ekonomi sentralistik dari negara-negara sosialis dalam wadah COMECON dan sistem ekonomi pasar dari negara-negara industri Barat (Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang) kini berkembang menjadi tiga polar,

yaitu pertama: Amerika Utara, kedua: Jepang, Cina dan ASEAN, serta ketiga: Uni Eropa. Ketiga polar itu diikat dengan berbagai kerjasama melalui wadah ASEM (Asean-European Meeting), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) dan Trans Atlantic Alliance. Setelah perang dingin, pengaruh perkembangan polar Uni Eropa cenderung melebar sampai ke Eropa Timur dan Afrika, Amerika Utara melebar sampai Amerika Latin, sedangkan Jepang, Cina, dan ASEAN melebar sampai ke Australia dan Selandia Baru.

**Keempat**, terjadinya perubahan pemain dalam tatanan global, dari yang dahulu didominasi oleh Pemerintah, sekarang didominasi organisasi NonPemerintah yaitu dari kalangan swasta, terutama perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporation, MNC), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perorangan (prominent person). Perubahan-perubahan seperti ini memberi dampak pada benturan kepentingan, karena para pemain baru tidak hanya memikirkan kepentingan nasional tetapi juga memikirkan kepentingan organisasi, golongan dan pribadinya masing-masing.

Dalam lingkup kerjasama formal antar pemerintah (first track) melalui jalur Perserikatan-Bangsa-Bangsa (PBB) dikembangkan enam agenda global yang cara pencapaiannya diupayakan secara bertahap, yaitu penegakan perdamaian (peace making), perlucutan senjata (disarmament), perdagangan dan pembangunan (trade and development),

manajemen sumberdaya global (global resource management), sosial dan kemanusiaan (social and humanitarian), dan aspek hukum (legal aspects). Sebaliknya untuk lingkup diluar PBB (second track) disamping dikembangkan kerjasama yang menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, juga dikembangkan upaya untuk implementasi nilai-nilai universal yang meliputi Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup dan demokratisasi, utamanya di negara-negara berkembang.

Dalam perkembangannya, dewasa ini telah terjadi paradok yang bersifat global (global paradox) yaitu terjadinya ikatan-ikatan kecil namun memiliki peran dominan. Global paradoks merupakan realitas baru yang membentuk wajah dunia mendatang seperti kegiatan turisme dan tribalisme. Turisme dianggap mempunyai peran dominan karena kegiatannya bersifat lokal, namun dalam praktek turisme mendorong pengembangan daerah yang mengangkat ekonomi dunia ketiga. Tribalisme (sukuisme) mendorong tumbuhnya kekuatan kelompok-kelompok beraneka ragam yang berafiliasi kepada suku. Tribalisme kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan suatu reaksi yang bersifat eksklusif dengan penonjolan suku yang sangat kuat, terutama dalam rangka mencapai cita-cita bersamanya.

Ada banyak pandangan mengenai proses globalisasi, diantaranya yang terkenal dari John Naisbitt (Megatrends 2000,1990) dan Roeslan

Abdulgani (Kebangkitan Nasional II Merupakan Penangkal terhadap Pengaruh Negatif Arus Globalisasi, 1992). Keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai proses globalisasi, oleh karena yang satu berasal dari negara maju sedangkan yang satunya lagi berasal dari negara berkembang.

Naisbitt menyatakan bahwa proses globalisasi adalah rangkaian langkah kesadaran dari semua bangsa, dimana ruang hidup manusia sama-sama berada dalam suatu globus atau dunia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah. Melalui pendapatnya itu, Naisbitt mencoba untuk menyam-paikan pesan bahwa proses globalisasi bertujuan untuk mensejajarkan atau menstarakan tingkat hidup dan martabat bangsa-bangsa di dunia. Pandangan yang berbeda dari Roeslan Abdulgani menegaskan bahwa proses globalisasi sebenarnya adalah kelanjutan dari proses ekspansionisme negara-negara Barat yang dimulai sejak abad ke tujuh belas, yang mengutamakan hubungan ketergantungan dunia ketiga dalam segala bidang terhadap dunia industri maju. Pendapat ini sangat kontradiktif dengan Naisbitt, karena proses globalisasi menurut Roeslan Abdulgani bukannya merupakan upaya mensejajarkan atau menstarakan tingkat hidup bangsa-bangsa di dunia, tetapi sebaliknya justru menciptakan ketergantungan dunia ketiga terhadap negara-negara industri maju. Tampaknya pendapat kedua

tokoh ini merefleksikan pandangan tokoh-tokoh lain mengenai proses globalisasi yang ada di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang.

Pada saat ini sulit mengatakan pendapat mana yang benar dan untuk membuktikannya, memerlukan waktu yang cukup lama. Walaupun demikian, negara-negara Amerika Latin yang mengalami krisis pada tahun 80-an, yaitu negara-negara ABC (Argentina, Brasil dan Chili), pada saat ini terbukti banyak bergantung pada negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa pendapat Roeslan Abdulgani adalah yang benar untuk kasus Amerika Latin. Namun, hal ini perlu dilihat lebih cermat lagi, apakah keadaan ini juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia dan tempat-tempat lain di belahan dunia.

#### **PENGARUH PERKEMBANGAN GLOBAL TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SISTEM NILAI**

Perkembangan global telah memberikan pengaruh pada berbagai aspek pembangunan nasional, antara lain:

**Pertama**, meningkatnya persaingan global harus mampu memberikan dorongan bagi peningkatan daya saing nasional. Berbagai model daya saing (Michael Porter, 1986 dan Dong Sung Cho, 1997) mengindikasikan bahwa faktor utama yang mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif adalah

faktor sumber daya manusia. Untuk itu, kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

**Kedua**, dominasi negara maju sangat menonjol dalam bidang ekonomi, bahkan tidak segan menggunakan tekanan politik dan militer untuk kepentingan mencapai tujuannya. Untuk itu, pembangunan nasional setelah pemulihan ekonomi dari krisis harus mampu mewujudkan fundamen ekonomi yang kokoh dan secara bertahap mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara-negara maju. Implementasi otonomi daerah diharapkan akan mampu mengembangkan lebih jauh potensi daerah guna mendukung pembangunan nasional.

**Ketiga**, implementasi dari nilai-nilai universal yaitu HAM, lingkungan hidup dan demokratisasi harus dapat diselaraskan dengan tahapan pembangunan nasional, sehingga proses reformasi yang saat ini digulirkan tidak menjadi kebablasan. Proses reformasi harus diartikan sebagai perubahan yang terarah dan terpadu menuju keadaan yang lebih baik (positif) serta dilakukan secara bertahap dan tidak secara drastis.

Dalam salah satu survey yang dilakukan oleh Bank Dunia (1989) ditunjukkan bahwa negara-negara yang proses demokratisasinya berjalan dengan baik maka pembentukan kelas menengahnya juga berjalan dengan baik. Tetapi, pada negara-negara dimana pembentukan kelas menengahnya kurang baik,

maka proses demokratisasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada saat ini dengan meningkatnya persentase penduduk miskin di Indonesia, kelas menengahnya telah menyusut semakin kecil dan dikhawatirkan tidak cukup untuk mendorong implementasi dari nilai-nilai universal, terutama proses demokratisasi. Hal tersebut ditambah lagi dengan berbagai kenyataan bahwa pada masa Orde Baru dahulu kelas menengah yang terbentuk adalah kelas menengah semu (Ersatz Capitalism atau Kapitalisme Semu). Kelas menengah ini terdiri dari kapitalis-kapitalis karbitan yang tumbuh dan berkembang, namun keberhasilannya dicapai sebagai akibat dari KKN atau sebagai akibat dari kapitalisme yang didongkrak oleh penguasa pada waktu itu (Kunio Yoshihara, 1980-an).

**Keempat**, divergensi kelompok negara maju (Amerika, Eropa dan Jepang) dalam forum multilateral seperti GATT (General Trade on Tariffs and Trade)/WTO (World Trade Organization) harus dapat dimanfaatkan Indonesia dengan mengembangkan industri yang berbasis sumberdaya alam. Secara khusus perlu diprioritaskan pengembangan industri hilir untuk mendapatkan produk akhir (final product) dalam rangka mendapatkan nilai tambah. Untuk itu harus dibuka pemberian insentif bagi investasi asing langsung (foreign direct investment).

**Kelima**, regionalisme harus dipandang sebagai jembatan (stepping stone) menuju

tercapainya globalisasi (global creation). Regionalisme tidak boleh dianggap sebagai hambatan terhadap proses globalisasi (global diversion), dimana negara-negara anggotanya lebih menonjolkan nilai-nilai regional yang justru nantinya dikuatkan menjadi suatu benteng yang tertutup. Hal ini juga berlaku dalam kaitannya dengan hubungan bilateral dan pengembangan segi tiga pertumbuhan. Untuk itu, keseimbangan pembangunan nasional diantara negara-negara anggotanya harus dapat diwujudkan melalui kerjasama regional, bilateral dan segitiga pertumbuhan.

Dalam kaitan dengan pengaruh global terhadap sistem nilai bangsa, perlu dipahami sebelumnya arti tentang nilai karena bersifat ideal dan abstrak, tidak dapat disentuh dengan pancaindera. Oleh karena nilai tidak bersifat eksak dan sifatnya relatif sehingga mudah dan selalu terjadi perbedaan. Perubahan dari keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain dan berlangsung dengan cepat dapat mengakibatkan penyimpangan dari sistem nilai semula. Dengan demikian maka pengertian nilai adalah suatu gambaran atau konsepsi dari individual atau kelompok manusia yang sangat didambakan untuk diwujudkan. Oleh karena sistem nilai yang ada itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak dan hanya dapat dirasakan dengan pendekatan filosofis, maka sistem nilai itu dapat digambarkan mencakup cita, cipta, rasa dan karsa.

Penetrasi sistem nilai global biasanya masuk dengan mudah melalui perusahaan multi-nasional (MNC), dikenal sebagai budaya korporat. Nilai-nilai tersebut terikat dengan ruang dan waktu, dan memberi bentuk budaya. Apabila sistem nilai itu terbentur dengan sistem nilai yang telah dimiliki oleh suatu negara, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah menghasilkan sinergi yang positif atau kemungkinan justru akan menjadi negatif. Untuk itu perlu dicermati dengan baik agar sistem nilai global yang akan menghasilkan sinergi positif dapat diterima, namun yang negatif perlu ditolak.

Sistem nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dipisahkan menjadi dua sistem nilai, yaitu pertama, nilai intrinsik atau nilai dasar yang permanen, dan kedua, nilai ekstrinsik yang bisa saja berubah setiap saat dalam rangka mencapai tujuan, artinya tidak permanen. Tujuan yang sebetulnya ada didalam sistem nilai intrinsik yang sifatnya permanen, merupakan wujud dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai intrinsik itu adalah nilai-nilai dasar, pandangan hidup bangsa, filsafat dan ideologi nasional Pancasila, yang semuanya tertuang didalam Pembukaan UUD 1945, yang berisi cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional, serta lima Sila dari Pancasila (never ending process). Nilai-nilai intrinsik mempunyai akar yang kuat dalam sejarah dan kepribadian bangsa yang menjadi pegangan bersama bangsa seterusnya. Agar nilai-nilai intrinsik ini tidak luntur, maka perlu terus

dilestarikan dari waktu ke waktu. Amandemen batang tubuh UUD 45 yang sedang dilakukan, harus tetap mengacu kepada isi yang terkandung dalam pembukaannya.

Proses globalisasi yang membawa sistem nilai baru dapat merubah pola pikir, pola sikap, budaya, perilaku. Perubahan yang terjadi kemungkinannya tidak hanya terbatas pada nilai pada nilai ekstrinsik tetapi dapat terus berlanjut menyentuh pada jatidiri dan kepribadian sehingga mengikis nilai intrinsik yang dipunyai oleh bangsa ini. Perubahan-perubahan ke arah positif dari nilai-nilai ekstrinsik dapat saja dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian formulasi nilai-nilai ekstrinsik perlu dilakukan terus-menerus dengan memperhatikan perubahan yang terjadi pada tataran nasional, regional dan global.

### **RUMUSAN KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN**

Dalam membahas pengaruh dari perkembangan global terhadap pembangunan nasional dan jatidiri bangsa, diperlukan langkah-langkah ke depan untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai akibat adanya perkembangan global.

Secara umum ditawarkan tiga pilihan reaksi terhadap pengaruh lingkungan global. **Pertama**, memberi gelombang pemukul kembali sebagai reaksi atas ancaman terhadap

nasionalisme. Pilihan ini mengandung risiko yang mengkhawatirkan munculnya nasionalisme yang berlebihan, sehingga tidak akan memberikan yang terbaik, karena dapat menyebabkan eksklusifisme atau nasionalisme sempit. Nasionalisme yang demikian itu akan menyebabkan terisolasi dari perkembangan dunia luar dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. **Kedua**, menyesuaikan kelangsungan hidup bangsa, dengan realitas global. Reaksi ini dikhawatirkan akan menjadikan bangsa ini menyerah terhadap penetrasi global. Walaupun belum diketahui dampaknya terhadap nilai yang telah dimiliki, tetapi apabila proses ini berlangsung terus-menerus maka dikhawatirkan akan dapat melunturkan nilai-nilai intrinsik bangsa. **Ketiga**, yang merupakan pilihan terbaik, menyerap sistem nilai ekstrinsik yang positif dan menolak yang negatif, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai intrinsik seperti yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945. Dengan melakukan sikap yang demikian, maka kepribadian bangsa masih dapat dipertahankan sementara secara luwes dapat menyesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

Untuk menghadapi perkembangan global kedepan, nilai idiil Pancasila dan nilai konstitusional UUD 1945 yang masih bersifat abstrak perlu dijembatani dengan menempatkan konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

## Pengaruh Lingkungan Global

sehingga dapat lebih operasional sebagai landasan bagi Program Pembangunan Nasional. Inti muatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional adalah bagaimana dapat mewujudkan persatuan bangsa, kesatuan wilayah dan tata kehidupan nasional yang seimbang dengan tetap menghargai adanya kebhinnekaan. Untuk itu, perlu dipertimbangkan agar prinsip-prinsip dasar Wawasan

Nusantara dan Ketahanan Nasional dapat dimasukkan dalam pasal-pasal amandemen UUD-45 yang saat ini sedang dibahas Panitia AdHoc-1 Badan Pekerja MPR, dengan alternatif untuk diformulasikan sebagai Ketetapan MPR tersendiri.

Selanjutnya, beberapa hal yang perlu tetap dipegang teguh dalam memformulasikan langkah-langkah kedepan guna menghadapi perkembangan global, adalah tetap berpijak

pada idealisme bangsa dan negara, namun harus dituangkan kedalam langkah-langkah yang realistis sesuai dengan kenyataan dan harus pula ditempuh melalui pendekatan yang pragmatis. Pragmatis disir! artinya tidak hanya berdasar kenyataan yang ada, tetapi juga berdasarkan pada terobosan-terobosan yang mampu dilakukan dengan tetap berpijak pada idealisme bangsa dan negara. ❖

